



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gede Pasek Suardika

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Karya Sumadi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Menteri Perhubungan

Kepala Badan Kebijakan Transportasi

BUDI KARYA SUMADI

GEDE PASEK SUARDIKA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	50 (Cukup)
		IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	85
		IKP 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	80

KEGIATAN

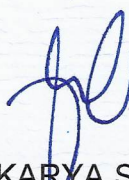
1. Formulasi Kebijakan Transportasi
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan
3. Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan
5. Legislasi dan Litigasi Kebijakan

ANGGARAN

Rp.	87.415.370.000,00
Rp.	2.668.650.000,00
Rp.	73.872.837.000,00
Rp.	432.578.000,00
Rp.	301.704.000,00

Disetujui,
Menteri Perhubungan

Jakarta, Januari 2023
Kepala Badan Kebijakan Transportasi


BUDI KARYA SUMADI


GEDE PASEK SUARDIKA



PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat
baketrans.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/ kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan/ program tahun 2023 di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Jakarta, Januari 2023

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



PANDU YUNianto, ATD., M.Eng, Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI		
2	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA USAHA		
3	KEPALA BAGIAN HUKUM, KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
4	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/ kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan/ program tahun 2023 di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Jakarta, Januari 2023

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



PANDU YUNianto, ATD., M.Eng, Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandu Yunianto, ATD, M.Eng, Sc.

Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc.

Pihak Pertama

Sekretaris
Badan Kebijakan Transportasi

PANDU YUNIANTO, ATD., M.Eng, Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	95
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14	Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	79,5
		IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	74

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
		IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	0,96
SK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92
		IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75

KEGIATAN

ANGGARAN

Program Infrastruktur Konektivitas

1. Formulasi Kebijakan Transportasi Rp12.358.412.000,00

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan Rp2.284.026.000,00

2. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perumus Kebijakan Rp60.266.271.000,00

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan Rp432.578.000,00

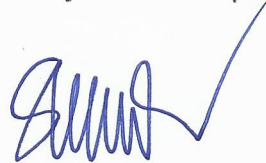
4. Legislasi dan Litigasi Kebijakan Rp301.704.000,00

Disetujui,

Jakarta, Januari 2023

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Sekretaris
Badan Kebijakan Transportasi



Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002



PANDU YUNianto, ATD., M.Eng, Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650606 198803 1 001

LAMPIRAN**PK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp12.358.412.000,00
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	Rp2.284.026.000,00
3.	Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perumus Kebijakan	Rp60.266.271.000,00
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan	Rp432.578.000,00
5.	Legislasi dan Litigasi Kebijakan	Rp301.704.000,00
TOTAL		Rp75.642.991.000,00

Anggaran Kegiatan Tahun 2023 :
Rp75.642.991.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
Program Infrastruktur Konektivitas			
IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada Tahun Berjalan		
	a. Koordinasi Pemetaan Isu Strategis Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp740.582.000,00
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi		
	a. Koordinasi Pengendalian Internal Perumusan Kebijakan	2 Laporan	Rp325.803.000,00
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Koordinasi Perencanaan Sistem Transportasi Wilayah Ibu Kota Negara Baru	1 Laporan	Rp194.651.000,00
	b. Harmonisasi Rencana Strategis Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp768.376.000,00
	c. Penyusunan <i>Roadmap</i> Perumusan Kebijakan di Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp355.000.000,00
	d. Analisis Indeks Kualitas Kebijakan	1 Laporan	Rp450.000.000,00
	e. <i>In House Consultant</i> Perencanaan Rumusan Kebijakan Bidang Transportasi	1 Laporan	Rp261.000.000,00
	f. Konsolidasi Penyiapan Bahan dan Materi Pimpinan	1 Layanan	Rp221.766.000,00
	g. Evaluasi Kemanfaatan Sektor Transportasi	1 Laporan	Rp101.585.000,00
	h. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Manfaat Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp298.100.000,00
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Konsolidasi dan Koordinasi Badan Kebijakan Transportasi	1 Dokumen	Rp569.370.000,00
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan		
	a. Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama Perumusan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp346.744.000,00
IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Kebijakan Sektor Transportasi	1 Laporan	Rp283.000.000,00
	b. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pusat Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp672.372.000,00
	c. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Rancangan Perumusan Kebijakan	1 Laporan	Rp93.698.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
	di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi		
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Pengembangan Kompetensi Pegawai	1 Laporan	Rp545.503.000,00
	b. Penyelenggaraan Kegiatan Temu Karya Analis Kebijakan	1 Laporan	Rp311.220.000,00
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Penyelenggaraan Koordinasi, Sosialisasi dan Bimtek Jabatan Fungsional	1 Laporan	Rp821.873.000,00
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data		
	a. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi E-Survey Dalam Rangka Mendukung Survey Strategis Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp391.071.000,00
	b. Survei Makro Transportasi Nasional	1 Laporan	Rp1.000.000.000,00
	c. Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp428.000.000,00
	d. Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi	1 Laporan	Rp399.060.000,00
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi		
	a. Penyelenggaraan Publikasi dan Koordinasi Peliputan Kegiatan Humas	1 Laporan	Rp778.102.000,00
	b. Penyelenggaraan Media <i>Relations</i>	1 Laporan	Rp263.432.000,00
	c. Pengelolaan Media Sosial	1 Laporan	Rp221.812.000,00
	d. Penyelenggaraan Pengelolaan Publikasi Jurnal Transportasi	1 Layanan	Rp1.154.184.000,00
	e. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	1 Laporan	Rp176.746.000,00
	f. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp185.362.000,00
Program Dukungan Manajemen			
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	4 Dokumen	Rp767.651.000,00
	b. Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH)	2 Laporan	Rp173.124.000,00
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Dokumen	Rp35.536.273.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
	b. Penyusunan Laporan Triwulanan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Transportasi	1 Dokumen	Rp265.688.000,00
	c. Penyusunan Laporan Keuangan	8 Laporan	Rp345.233.000,00
	d. Pelaksanaan dan Pelaporan PIPK Badan Kebijakan Transportasi	1 Dokumen	Rp133.393.000,00
	e. Pelaksanaan dan Pelaporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan	1 Dokumen	Rp108.832.000,00
	f. Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	Rp228.244.000,00
	g. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	Rp9.669.536.000,00
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP	12 Dokumen	Rp712.070.000,00
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Kebijakan Transportasi	6 Laporan	Rp455.758.000,00
	b. Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Kebijakan Transportasi	6 Laporan	Rp441.804.000,00
	c. Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Layanan	Rp702.970.000,00
	d. Pengadaan <i>Furniture Custom</i>	1 Layanan	Rp175.000.000,00
	e. Pengadaan AC	1 Layanan	Rp45.000.000,00
	f. Renovasi Rumah Ibadah	1 Layanan	Rp1.256.000.000,00
	g. Perangkat Manajemen Jaringan	1 Layanan	Rp87.870.000,00
	h. Pengadaan Alat Pemroses Data	1 Layanan	Rp233.232.000,00
	i. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	Rp1.614.109.000,00
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan		
	a. Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp301.704.000,00
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran		
	a. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Petugas Keamanan, Kebersihan, Pengemudi dan Teknisi di Gedung Merdeka Timur	1 Layanan	Rp726.827.000,00
	b. Pencegahan Penyebaran Covid-19	1 Layanan	Rp603.522.000,00
	c. Pelaksanaan Satuan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban Gedung (PKG)	1 Layanan	Rp371.585.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
	d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	Rp5.419.394.000,00
	e. Perangkat Audio Pendukung Zoom	1 Layanan	Rp75.514.000,00
IKK 14	Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Bidang SDM dan Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp292.078.000,00
	b. Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi	1 Laporan	Rp158.084.000,00
	c. Penataan Organisasi	1 Laporan	Rp256.998.000,00
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Pengembangan Motivasi Pegawai	1 Laporan	Rp465.190.000,00
	b. Pembinaan Karir dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	6 Dokumen	Rp206.844.000,00
	c. Pengelolaan Kegiatan Konseling Pegawai	1 Laporan	Rp247.523.000,00
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Penyelenggaraan Fungsi Ketatausahaan, Kearsipan dan Keprotokolan	1 Laporan	Rp117.642.000,00
	b. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	Rp547.617.000,00
	c. Penyelenggaraan Administrasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional	1 Layanan	Rp109.692.000,00
IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan		
	a. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Koordinasi Perpustakaan	1 Layanan	Rp432.578.000,00



PERJANJIAN KINERJA

PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI TAHUN 2023

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat
baketrans.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran kegiatan beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI



Dr. Ir. MAKJEN SINAGA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630101 199403 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KEPALA BIDANG KEBIJAKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	5/01/2023	
2	KEPALA BIDANG KEBIJAKAN KEAMANAN TRANSPORTASI	5/01/2023	

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran kegiatan beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI



Dr. Ir. MAKJEN SINAGA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630101 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Makjen Sinaga, M.T.

Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc.

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc.

Pihak Pertama
KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI

Dr. Ir. MAKJEN SINAGA, M.T.

KEGIATAN

ANGGARAN

Program Infrastruktur Konektivitas

1. Formulasi Kebijakan Transportasi

Rp18.445.324.000,00

Program Dukungan Manajemen

1. Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan

Rp3.296.422.000,00

Disetujui,

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI



Dr. Ir. MAKJEN SINAGA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630101 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi	%	85
		IKK 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	38
		IKK 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK	%	85
		IKK 4	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif	IKK 5	Tingkat Kemanfaatan Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Keterangan : IKK 2 dan IKK 4 Akan Dilakukan Penghitungan Pada Tahun 2024

LAMPIRAN

PK PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Infrastruktur Konektivitas		
1.	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp18.445.324.000,00
Program Dukungan Manajemen		
1.	Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	Rp3.296.422.000,00
	TOTAL	Rp21.741.476.000,00

Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp21.741.746.000,00

NO	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
A.	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
IKK 1	Presentase Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi		
	Kebijakan Pembangunan Transportasi		
	a. Evaluasi Kebijakan Penindakan Berat Muatan Angkutan Barang Melalui Penerapan Jembatan Timbang di Pintu Tol	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp903.556.000,00
	b. Penyusunan Standar Marka Optik Serong Pada Jalan Tol	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp347.095.000,00
	c. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7 Rekomendasi Kebijakan	Rp1.947.935.000,00
	d. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Augmented Reality Dalam Keselamatan Pelayaran di Ibu Kota Negara (IKN)	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp953.332.000,00
	e. Penyusunan Rekomendasi Pengoperasian Kereta Api Cepat di Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp940.311.000,00
IKK 2	Presentase Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)		
	Presentase Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK		
	Rumusan NSPK Transportasi		
	a. Standar Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp497.670.000,00
	b. Mitigasi Kebakaran di Bidang Sarana Prasarana Perkeretaapian	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp920.672.000,00
	c. Mitigasi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Pasca Bencana Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp409.935.000,00
	d. Evaluasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp921.218.000,00
IKK 4	Presentase Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK (t-2)		
IKK 5	Presentase Kemanfaatan Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan		
	Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan		
	a. Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping	1 Kegiatan	Rp1.806.293.000,00
	b. Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan	1 Kegiatan	Rp1.834.505.000,00
	c. Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan	1 Kegiatan	Rp1.375.877.000,00
	d. Pendampingan, Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	1 Kegiatan	Rp3.305.837.000,00
IKK 6	Presentase Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)		
	e. Peningkatan Kendali Mutu Analisa	1 Kegiatan	Rp871.000.000,00

	Kebijakan		
	f. Direktif Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi	2 Kegiatan Direktif Menteri Perhubungan	Rp991.021.000,00
B.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi		
IKK 6	a. Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	Rp147.040.000,00
	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi		
IKK 7	a. Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan	2 Dokumen	Rp605.985.000,00
	b. Rencana Strategis Transportasi Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Dokumen	Rp197.000.000,00
	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi		
IKK 8	a. Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM Penunjang Teknis	1 Dokumen	Rp150.000.000,00
	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi		
IKK 9	a. Koordinasi Penyelenggaraan SAKIP	8 Dokumen	Rp275.000.000,00
	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi		
IKK 10	a. Administrasi Satuan Kerja, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	Rp306.000.000,00
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi		
	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran		
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	
IKK 12	a. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		Rp1.316.717.000,00
	b. Pengelola Anggaran		Rp118.680.000,00
	Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggan	1 Layanan	
	a. Penanganan Pandemi Covid-19		Rp180.000.000,00



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : 002/PKUA TP / 1 / 2023

Yth : Kepala Badan Kebijakan Transportasi
Dari : Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan
Hal : Penyampaian Konsep Perjanjian Kerja Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan
Tanggal : 6 Januari 2023

Dengan hormat, menindaklanjuti pembaharuan Perjanjian Kerja untuk Tahun Anggaran Tahun 2023 bersama ini dapat kami laporkan konsep Penyampaian Konsep Perjanjian Kerja Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan yang telah disusun sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, mohon perkenan arahan Bapak Badan Kebijakan Transportasi.

Eddy Gunawan, ATD., M. Eng.SC.
NIP. 19630208 198303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Gunawan, ATD., M.Eng.Sc.

Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi
Perkotaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc

Pihak Pertama

Kepala
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan,
dan Transportasi Perkotaan

EDDY GUNAWAN, ATD., M.Eng,Sc.

KEGIATAN**ANGGARAN****Program Infrastruktur Konektivitas**

1. Formulasi Kebijakan Transportasi

Rp. 18.788.023.000,-

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Organisasi, dan SDM Perumus Kebijakan

Rp. 153.550.000,-

2. Perencanaan Keuangan, SDM, dan Umum Perumus Kebijakan

Rp. 3.404.377.000,-

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi



Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307171989031002

Jakarta, Januari 2023
Kepala
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan,
dan Transportasi Perkotaan



EDDY GUNAWAN, ATD., M.Eng.Sc.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630208 198303 1 002



PERJANJIAN KINERJA

**PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2023**

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat
baketrans.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategi Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dan khususnya pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,
ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI
PERKOTAAN,



EDDY GUNAWAN, ATD., M.Eng.Sc.
NIP. 19630208 198303 1 002

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Lalulintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategi Pusat Kebijakan Lalulintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dan khususnya pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,
ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI
PERKOTAAN,



EDDY GUNAWAN, ATD., M.Eng., Sc.
NIP. 19630208 198303 1 002

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KEPALA BIDANG KEBIJAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		
2	KEPALA BIDANG KEBIJAKAN TRANSPORTASI PERKOTAAN		



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Gunawan, ATD., M.Eng.Sc.

Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi
Perkotaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc

Pihak Pertama

Kepala
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan,
dan Transportasi Perkotaan

EDDY GUNAWAN, ATD., M.Eng.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI
PERKOTAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	85
		IKK 2	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	38
		IKK 3	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (Tahun Berjalan)	%	0
		IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Yang Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Keterangan: IKK 2 dan 4 akan dilakukan perhitungan pada Tahun 2024

KEGIATAN**ANGGARAN****Program Infrastruktur Konektivitas**

1. Formulasi Kebijakan Transportasi

Rp. 18.788.023.000,-

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Organisasi, dan SDM Perumus Kebijakan

Rp. 153.550.000,-

2. Perencanaan Keuangan, SDM, dan Umum Perumus Kebijakan

Rp. 3.404.377.000,-

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi



Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307171989031002

Jakarta, Januari 2023
Kepala
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan,
dan Transportasi Perkotaan

EDDY GUNAWAN, ATD., M.Eng.Sc.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630208 198303 1 002

LAMPIRAN**PK Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan
Tahun 2023**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Infrastruktur Konektivitas		
1.	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp. 18.788.023.000,-
Program Dukungan Manajemen		
1.	Pengelolaan Organisasi, dan SDM Perumus Kebijakan	Rp. 153.550.000,-
2.	Perencanaan Keuangan, SDM, dan Umum Perumus Kebijakan	Rp. 3.404.377.000,-
TOTAL		Rp. 22.345.950.000,-

Anggaran Kegiatan Tahun 2023:
Rp. 22.246.709.000,-

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (tahun berjalan)	Rp.	10.715.818.000,-
	1. Analisis Kebijakan Penerapan <i>Electronic Ticketing</i> Terintegrasi Pada Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan	1 Laporan	Rp. 925.065.000,-
	2. Analisis Potensi Pergerakan Masyarakat Tahun 2023	1 Laporan	Rp. 858.806.000,-
	3. Evaluasi Pengaturan Angkutan dan Tarif Kargo di Indonesia	1 Laporan	Rp. 516.562.000,-
	4. Penyusunan Rekomendasi Optimalisasi dan Integrasi Penyelenggaraan Subsidi ANGkutan Perintis dan PSO Kereta Api	1 Laporan	Rp. 507.676.000,-
	5. Analisa Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	1 Laporan	Rp. 2.013.643.000,-
	6. Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	1 Laporan	Rp. 1.228.024.000,-
	7. Analisis Kebijakan Rencana Implementasi Penyelenggaraan Integrasi Pentarifan Transportasi Umum di IKN	1 Laporan	Rp. 915.493.000,-
	8. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Jaringan Sistem Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Ibu Kota Negara (IKN)	1 Laporan	Rp. 937.535.000,-
	9. Analisis Kebijakan Pengembangan Konektivitas Angkutan Wisata di Kawasan Raja Ampat	1 Laporan	Rp. 950.630.000,-
	10. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Jalur Logistik di Indonesia Untuk Mendukung Food Estate dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 Laporan	Rp. 943.728.000,-
	11. Analisis Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian	1 Laporan	Rp. 461.902.000,-
	12. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kereta Api Perkotaan	1 Laporan	Rp. 456.754.000,-
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)		-
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (tahun berjalan)	Rp	-
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)		-
IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	Rp.	8.072.205.000,-
	a. Koordinator Perencanaan Strategis dan Pemetaan Issue / Agenda Mapping	1 Laporan	Rp. 1.743.086.000,-
	b. Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan	1 Laporan	Rp. 1.698.642.000,-
	c. Dukungan Harmonisasi dan Rancangan Kebijakan	1 Laporan	Rp. 989.855.000,-

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
	d. Pendampingan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	1 Laporan	Rp. 2.506.555.000,-
	e. Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan	1 Laporan	Rp. 634.067.000,-
	f. Data Produksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,-
IKK 6	Tingkat maturitas SPIP yang terintegrasi	Rp.	138.612.000,-
	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	Rp. 138.612.000,-
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Rp.	757.402.000,-
	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran Dan Rencana Kinerja Tahunan Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan	1 Laporan	Rp. 757.402.000,-
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi		Rp. 153.550.000,-
	a. Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM	1 Laporan	Rp. 153.550.000,-
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Rp.	289.176.000,-
	Penyelenggaraan SAKIP Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	9 Laporan	Rp. 289.176.000,-
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Rp.	325.184.000,-
	a. Administrasi Satuan Kerja, Keuangan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Laporan	Rp. 325.184.000,-
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	Rp. -	
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Rp.	1.894.003.000,-
	a. Pencegahan Penyebaran Covid-19	1 Laporan	Rp. 268.830.000,-
	b. Operasional dan Pemeliharaan	1 Laporan	Rp. 1.625.173.000,-



PERJANJIAN KINERJA

PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI TAHUN 2023

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat
baketrans.dephub.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Gunung Hutapea. M.M.

Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Gede Pasek Suardika., M.Sc.

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta. Januari 2023

Pihak Kedua.

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Dr. Gede Pasek Suardika., M.Sc.

Pihak Pertama.

Kepala
Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi

Dr. Ir. Gunung Hutapea. M.M.

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

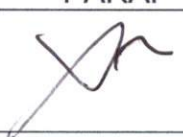
Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/ kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan dan khususnya pada Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi


Dr. Ir. Gunung Hutapea, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630925 199303 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1.	Kabid Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		
2.	Kabid Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan		

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/ kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan dan khususnya pada Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi



Dr. Ir. Gunung Hutapea, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630925 199303 1 001

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp18.923.160.000.00
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	Rp120.000.000.00
3. Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumus Kebijakan	Rp3.670.583.000.00

Jakarta. Januari 2023

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi



Dr. Gede Pasek Suardika. M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

Kepala
Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi



Dr. Ir. Gunung Hutapea. M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630925 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi	IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi	%	85
		IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)	%	38
		IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK	%	85
		IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100
SK3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	75
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	85
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Keterangan: Pada IKK 2 dan IKK 4 akan dilakukan perhitungan pada Tahun 2024

LAMPIRAN**Perjanjian Kinerja
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
Tahun 2022**

Kegiatan		Anggaran
1.	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp18.923.160.000.00
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	Rp120.000.000.00
3.	Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Perumus Kebijakan	Rp3.670.583.000.00
TOTAL		Rp22.713.743,000,00

Anggaran Kegiatan Tahun 2023 :
Rp22.713.743.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP-)
IKK 1	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi		Rp8.755.238.000,00
	1. Perumusan Kebijakan Pembukaan AMO Berbasis Potential Demand dan Mekanisme Mutual Recognition Arrangement	1 Laporan	Rp505.295.000,00
	2. Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Bus High Deck Sebagai Sarana Angkutan Barang	1 Laporan	Rp524.693.000,00
	3. Perumusan Kebijakan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Pra Audit IMO/IMSAS	1 Laporan	Rp506.138.000,00
	4. Perumusan Kebijakan Kepemilikan Pesawat Udara Dalam Bisnis Penerbangan	1 Laporan	Rp542.000.000 ,00
	5. Perumusan Kebijakan Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian Uji Tak Rusak (Non Destructive Testing)	1 Laporan	Rp500.264.000 ,00
	6. Analisa Kebijakan Bidang Sarana Transportasi	1 Laporan	Rp2.150.500.000 ,00
	7. Direktif Menteri Perhubungan Bidang Sarana Transportasi	1 Laporan	Rp1.405.930.000 ,00
	8. Perumusan Kebijakan Rencana Implementasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART) di IKN	1 Laporan	Rp997.650.000 ,00
	9. Perumusan Kebijakan Mekanisme Insentif Bagi Airline Dalam Penggunaan SAF (Sustainable Aviation Fuel)	1 Laporan	Rp998.850.000 ,00
	10. Perumusan Kebijakan Terkait Angkutan Massal Pada Kawasan Aglomerasi di Indonesia	1 Laporan	Rp623.918.000 ,00
IKK 2	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)		Rp623.918.000 ,00
IKK 3	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK		Rp1.310.721.000 ,00
	1. Perumusan Kebijakan Penyempurnaan Ketentuan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (Non-Convention Vessel Standard)	1 Laporan	Rp698.213.000 ,00
	2. Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Industri Perkapalan Nasional	1 Laporan	Rp612.508.000 ,00
IKK 4	Persentase pemanfaatan rekomendasi rumusan NSPK (t-2)		Rp623.918.000 ,00
IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan		Rp8.857.201.000 ,00
	1. Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping	1 Laporan	Rp2.496.640.000,00
	2. Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan	1 Laporan	Rp2.047.049.000,00
	3. Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan	1 Laporan	Rp1.112.762.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP-)
	4. Pendampingan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan	1 Laporan	Rp2.150.000.000,00
	5. Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan	1 Laporan	Rp850.750.000,00
IKK 6	Tingkat maturitas SPIP yang terintegrasi		
	1. Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	Rp147.000.000 ,00
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi		Rp789.451.000 ,00
	1. Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran, Dan Rencana Kinerja Tahunan Bidang Kebijakan Sarana Transportasi	1 Laporan	Rp592.451.000 ,00
	2. Rencana Strategis Transportasi Bidang Sarana	1 Laporan	Rp197.000.000 ,00
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi		
	1. Administrasi Satuan Kerja, Keuangan, dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Laporan	Rp200.000.000,00
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi		
	1. Penyelenggaraan SAKIP Bidang Sarana Transportasi	9 Laporan	Rp235.000.000 ,00
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi		
	1. Administrasi Satuan Kerja, Keuangan, dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Laporan	Rp100.000.000 ,00
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi		
	1. Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping	1 Laporan	Rp200.000.000,00
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran		
	1. Administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan	1 Laporan	Rp250.000.000 ,00
	2. Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM Penunjang Teknis	1 Laporan	Rp120.000.000,00
	3. Perbaikan peralatan kantor	1 Laporan	Rp198.622.000,00
	4. Perawatan kendaraan	1 Laporan	Rp212.890.000,00
	5. Langganan daya dan jasa	1 Laporan	Rp266.082.000,00
	6. Operasional perkantoran	1 Laporan	Rp82.080.000,00
	7. Honor pramubakti	1 Laporan	Rp955.500.000,00
	8. Pengadaan pakaian dinas	1 Laporan	Rp115.278.000,00
	9. Honor pengelola anggaran	1 Laporan	Rp118.680.000,00



PERJANJIAN KINERJA

PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA TAHUN 2023

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat
baketrans.dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

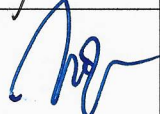
Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dan khususnya pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA
TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA



Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.
NIP. 19681123 201611 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	KEPALA BIDANG KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN, PERKERETAAPIAN, DAN INTEGRASI MODA	5/1/23	
2	KEPALA BIDANG KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI PELAYARAN DAN PENERBANGAN	5-01-23	

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran program/kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dan khususnya pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA
TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA



Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19681123 201611 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M.

Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc

Pihak Pertama

Kepala
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi
dan Integrasi Moda

Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	85
		IKK 2	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	38
		IKK 3	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (Tahun Berjalan)	%	85
		IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Yang Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Keterangan: IKK 2 dan 4 akan dilakukan perhitungan pada Tahun 2024

LAMPIRAN**PK Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Tahun 2023**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Infrastruktur Konektivitas		
1.	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp18.900.451.000,00
Program Dukungan Manajemen		
1.	Pengelolaan Organisasi, dan SDM Perumus Kebijakan	Rp111.074.000,00
2.	Perencanaan Keuangan, SDM, dan Umum Perumus Kebijakan	Rp3.325.184.000,00
TOTAL		Rp22.246.709.000,00

KEGIATAN

Program Infrastruktur Konektivitas

1. Formulasi Kebijakan Transportasi

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Organisasi, dan SDM Perumus Kebijakan
2. Perencanaan Keuangan, SDM, dan Umum Perumus Kebijakan

ANGGARAN

Rp18.900.451.000,00

Rp111.074.000,00

Rp3.325.184.000,00

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi



Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307171989031002

Jakarta, Januari 2023
Kepala
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi
dan Integrasi Moda



Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681123 201611 1 001

Anggaran Kegiatan Tahun 2023:
Rp22.246.709.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)		
	1. Perumusan Kebijakan Penentuan Kriteria Bandar Udara Pengumpul dan Pengumpan (Hub and Spoke) Untuk Optimalisasi dan Penguatan Jaringan Transportasi Udara	1 Laporan	Rp587.058.000,00
	2. Penyusunan Rekomendasi Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan dan Bandara	1 Laporan	Rp553.355.000,00
	3. Evaluasi Kebijakan Mekanisme Slot Time Penerbangan	1 Laporan	Rp497.103.000,00
	4. Perumusan Kebijakan Implementasi Dryport Untuk Distribusi Komoditas Kopi di Provinsi Aceh	1 Laporan	Rp844.776.000,00
	5. Analisa Kebijakan Strategis Bidang Prasarana dan Integrasi Moda	1 Laporan	Rp1.304.686.000,00
	6. Direktif Menteri Bidang Prasarana dan Integrasi Moda	1 Laporan	Rp1.442.643.000,00
	7. Analisis Kebijakan Implementasi Remote Tower di Bandara Wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)	1 Laporan	Rp462.286.000,00
	8. Evaluasi Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Udara	1 Laporan	Rp632.343.000,00
	9. Perumusan Kebijakan Dukungan Infrastruktur Pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 Laporan	Rp820.122.000,00
IKK 2	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (T-2)		
IKK 3	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (Tahun Berjalan)		
	1. Perumusan Kebijakan Integrasi Moda di Kawasan Bandar Udara Dalam Mendukung Pariwisata Nasional	1 Laporan	Rp791.691.000,00
	2. Perumusan Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Simpul Industri Pusat Perawatan	1 Laporan	Rp918.051.000,00
	3. Perumusan Kebijakan Wilayah Daerah Lingkungan Kerja (Dlkr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (Dlkp) Pelabuhan dan Alur Pelayaran	1 Laporan	Rp934.638.000,00
IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (T-2)		
IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan		
	a. Koordinator Perencanaan Strategis dan Pemetaan Issue / Agenda Mapping	1 Laporan	Rp2.870.577.000,00

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN (RP.-)
	b. Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan	1 Laporan	Rp1.784.329.000,00
	c. Dukungan Harmonisasi dan Rancangan Kebijakan	1 Laporan	Rp1.074.629.000,00
	d. Pendampingan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan	1 Laporan	Rp2.936.951.000,00
	e. Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan	1 Laporan	Rp445.213.000,00
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Yang Terintegrasi		
	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	Rp128.875.000,00
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi		
	Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran Dan Rencana Kinerja Tahunan Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1 Laporan	Rp758.650.000,00
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Administrasi Pengelolaan Ketatausahaan, Umum dan SDM	1 Laporan	Rp111.074.000,00
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi		
	Penyelenggaraan SAKIP Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	9 Laporan	Rp304.710.000,00
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi		
	a. Administrasi Satuan Kerja, Keuangan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Laporan	Rp267.635.000,00
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi		
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran		
	a. Pencegahan Penyebaran Covid-19	1 Laporan	Rp303.327.000,00
	b. Operasional dan Pemeliharaan	1 Laporan	Rp1.471.987.000,00